



Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Di SMP Negeri 1 Mentarang, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau

Henry^{1*}, Muhlis Hafel², Darmanto³

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: otniel.henry@gmail.com^{1}, muhlis@ecampus.ut.ac.id², darmanto@ecampus.ut.ac.id³

*Correspondence

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan penerapan kebijakan terkait kriteria minimal tentang aspek-aspek yang relevan untuk mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekolah selaku implementor di lapangan, komite sekolah, dan peserta didik selaku kelompok sasaran implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Pengawas Sekolah selaku leading sektor yang mengkomunikasikan, menggerakkan, dan mendorong implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan serta Dewan Pendidikan selaku pemerhati pendidikan. Secara Keseluruhan implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang telah terpenuhi dan dapat dilihat dari data-data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor yang menjadi model implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (sikap atau attitudes), dan struktur organisasi/Birokrasi (bureaucratic structure) telah dilaksanakan dengan baik sebagai upaya pemenuhan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang, akan tetapi perlu dioptimalkan, karena keempat faktor tersebut dapat menjadi penghambat bagi implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, standar nasional pendidikan (SNP).

ABSTRACT

The implementation of the National Education Standards (SNP) policy is the implementation of policies related to minimum criteria on relevant aspects to support the implementation of the national education system and must be fulfilled by education providers and/or units in all jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to describe the implementation of the National Education Standards policy and the factors that affect the implementation of the National Education Standards policy at SMP Negeri 1 Mentarang, Mentarang District, Malinau Regency. The design of this study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The informants in this study consist of schools as implementers in the field, school committees, and students as the target group for the implementation of the National Education Standards policy as well as the Malinau Regency Education Office and School Supervisors as leading sectors that communicate, drive, and encourage the implementation of the National Education Standards policy and the Board of Education as education observers. Overall, the implementation of the National Education Standards policy at SMP Negeri 1 Mentarang has been fulfilled and can be seen from the data obtained. The results of the study show that the four factors that are the model for the implementation of public policies, namely

communication, resources, disposition (attitudes), and organizational structure/bureaucratic structure (bureaucratic structure) have been implemented well as an effort to fulfill the National Education Standards policy at SMP Negeri 1 Mentarang, but it needs to be optimized, because these four factors can be an obstacle to the implementation of the Standard policy National Education at SMP Negeri 1 Mentarang.

Keywords: *implementation, policies, national education standards (SNP).*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dan fundamental dalam pembentukan pribadi manusia, baik sebagai individu, keluarga maupun sebagai masyarakat atau bangsa. Menyadari akan pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah sangat serius menangani dan berusaha terus untuk menyediakan instrumen sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, sebab dengan mutu pendidikan yang baik diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompatibel sebagai generasi penerus bangsa yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Jamin, 2018).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB IX Pasal 35 (Kementerian Sekretariat Negara 2017):

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam undang-undang tersebut untuk selanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 (ayat 2) sebagai: “kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Kementerian Sekretariat Negara 2021) yang mencakup: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian Pendidikan; (5) Standar Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan, (8) Standar Pembiayaan.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah ini, SMP Negeri 1 Mentarang sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berada di kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan bagian dari pelaku kebijakan (implementor) tentu berkewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut guna memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat setempat, sebagaimana cita-cita bangsa yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya sebagai hakikat pembangunan nasional Indonesia. Karenanya peneliti tertarik melakukan observasi untuk mengetahui sejauhmana SMP Negeri 1 Mentarang selaku implementor kebijakan telah melaksanakan implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan, bahwa terdapat kendala atau hambatan bagi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan SNP tersebut, akan ditelusuri melalui penelitian awal.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan dengan menemukan dan menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi sesuai dengan masalah yang dikaji (Sidiq et al., 2019). Karenanya, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan penelitian yang digunakan diharapkan akan diperoleh jawaban dan persepsi dari berbagai informan seperti para implementor dan target grup, yakni Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan selaku leading sektor pada tingkat pemerintah, dan pengawas sekolah serta satuan pendidikan secara khusus SMP Negeri 1 Mentarang (Kepala Sekolah selaku leading sektor di lapangan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa selaku target grup).

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh hasil wawancara dari target grup serta pihak yang berkepentingan dan dokumen resmi lainnya, sehingga melalui pendekatan penelitian ini dapat ditemukan jawaban bagi pertanyaan penelitian awal sebagai dasar dari kajian ini.

Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen (Makbul, 2021). Dalam melakukan penelitian, informasi melalui data merupakan tujuan utama yang hendak diperoleh dengan menggunakan instrumen, karena instrumen adalah nafas dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (Garung & Ga, 2020), “instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.”

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua, yaitu instrumen yang memuat hasil telaah dokumen dan instrumen yang memuat pedoman wawancara. Instrumen dimaksud bertujuan untuk membantu peneliti mengetahui sejauhmana SMP Negeri 1 Mentarang telah mengimplementasikan kebijakan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian dari hasil instrumen tersebut, dapat dilakukan interpretasi untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang menjadi “kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Kementerian Sekretariat Negara 2021), dimana fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah:

1. menjadi patokan bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan kualitas minimal di delapan domain standar agar setiap warganegara Indonesia dapat menggunakan hak mendapatkan pendidikan berkualitas;
2. bagi Pengembang Kurikulum Nasional, sebagai acuan bagi pengembangan Kerangka Dasar Kurikulum Nasional;
3. bagi pelaksana pendidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan) suatu satuan pendidikan adalah untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mencapai kualitas atau kompetensi yang dinyatakan dalam standar;
4. landasan dan patokan bagi pertanggungjawaban (akuntabilitas) satuan pendidikan; pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;

5. dan bagi pengembang kurikulum tingkat nasional sebagai acuan untuk mengembangkan Kerangka Kurikulum Nasional. Bagi pengembang kurikulum tingkat daerah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal untuk wilayah masing-masing. Bagi pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai acuan untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (BSNP 2021:16)

Sementara tujuan dari Standar Nasional Pendidikan menurut BSNP (Alawiyah, 2017), delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman, agar pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu. SNP juga bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Septiana et al., 2023).

Oleh sebab itu, lembaga atau satuan pendidikan sebagai pelaku kebijakan pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas utama adalah pada peningkatan mutu pembelajaran, kualitas manajemen lembaga, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan sekolah/madrasah, kultur atau budaya yang mendorong dan menciptakan suasana yang lebih edukatif, serta iklim lembaga yang kompetitif dengan berorientasi ke masa depan.

Fasilitas (facility)

Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 menjelaskan, bahwa standar sarana dan prasarana tersebut meliputi:

(1) kriteria minimal untuk sarana terdiri atas perabot, instrumen pendidikan, media pendidikan, buku teks, sumber dan bahan pembelajaran, TIK, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang wajib dipenuhi atau dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, (2) kriteria minimal prasarana terdiri atas lokasi/lahan, fisik bangunan, ruangan, dan seperangkat peralatan daya dan jasa yang wajib dipenuhi atau dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. (Kementerian Sekretariat Negara 2007).

Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah sebagaimana diatur dalam SNP 57 tahun 2021 dan Permendiknas di atas, Dinas Pendidikan kabupaten Malinau selaku leading sektor di daerah atau perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang menjadi motor penggerak implementasi kebijakan SNP di setiap satuan pendidikan, berkewajiban melakukan sosialisasi dan pendampingan ke sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP, agar implementasi kebijakan SNP di sekolah-sekolah berjalan efektif.

Kabid Pembinaan Pendidikan SD/SMP kabupaten Malinau, menyatakan bahwa

“fasilitas yang digunakan oleh para staf dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah-sekolah agar optimal dalam melaksanakan kebijakan SNP adalah disediakan perangkat elektronik pendukung seperti laptop, harddisk yang memuat file tentang PP 57 tahun 2021 dan penjelasan delapan SNP melalui Permendikbud atau Permendikbudristek dan tentunya biaya untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan SNP ke sekolah-sekolah di pelosok” (Wawancara dengan bapak Parsi Parir, S.Pd. / Kabid. Pemb. Pddk. SD/SMP, Maret 2022).

Fasilitas yang digunakan tentu sebagai penunjang bagi proses pendampingan yang dilakukan oleh para staf di Dinas Pendidikan dalam rangka mendorong sekolah-sekolah atau satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan SNP termasuk kepada SMP Negeri 1 Mentarang (Dewi, 2019).

Disposition

Secara realistik, respon atau sikap implementor terhadap sebuah kebijakan baru berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Sikap menerima itu dikarenakan komitmen dan kemampuan implementor untuk beradaptasi terhadap situasi lingkungan kerja yang mengalami perubahan dan perkembangan. Sebaliknya, sikap menolak (resistensi) terhadap suatu perubahan dikarenakan adanya ketidaksiapan implementor secara psikologis menghadapi perubahan sehingga lebih cenderung berjalan seperti biasa, ketakutan berpikir (kognitif) terhadap perkembangan, rendahnya stimulus terhadap perubahan sehingga komitmen untuk melakukan perubahan sangat rendah, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan dengan implementasi kebijakan SNP, tentu berbagai sikap beragam dari para implementor terhadap kebijakan tersebut juga muncul, baik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan kabupaten Malinau selaku leading sektor, maupun SMP Negeri 1 Mentarang selaku target grup. Namun di tingkat OPD telah ditetapkan beberapa staf yang berkompeten untuk tugas pendampingan terkait kebijakan SNP di satuan pendidikan dalam wilayah kabupaten Malinau. Dengan adanya penetapan staf untuk tugas tersebut, menjadi komitmen pemerintah untuk mendorong dan menggerakan implementasi kebijakan SNP di sekolah-sekolah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia merupakan sebuah kebijakan atau seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan nasional. SNP berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, agar dalam mengelola dan memproses pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memiliki nilai tambah serta menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Untuk mencapai kualitas pendidikan tersebut, maka SNP harus diimplementasi oleh implementor yang berkualitas pula, karenanya semua pihak yang berkepentingan harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kualitas pendidikan, dalam hal ini OPD selaku leading sektor dan SMP Negeri 1 Mentarang selaku kelompok sasaran (target group) yang terlibat langsung dalam mengimplementasi SNP. Demikian sebaliknya, apabila para implementor tidak memenuhi standar berkualitas, maka implementasi kebijakan SNP juga mengalami hambatan, sehingga berdampak pada belum tercapainya kualitas pendidikan. Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat tersebut sangat krusial dalam implementasi kebijakan SNP. Oleh sebab itu, sebagaimana paparan-paparan di atas, bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi.

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan SNP di SMP Negeri 1 Mentarang mendorong terlaksananya SNP yang efektif dan efisien. Pada pembahasan di atas, telah dijelaskan bagaimana SMP Negeri 1 Mentarang telah mengimplementasikan kebijakan SNP dan model implementasi kebijakan berdasarkan teori George C Edward III telah diterapkan dengan baik sebagaimana yang dipaparkan melalui hasil wawancara di atas. Sebagaimana pernyataan para informan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SNP di SMP Negeri 1 Mentarang menunjukkan

bahwa keempat variabel atau faktor implementasi model C. Edward III, yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi, memberi pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan SNP di SMP Negeri 1 Mentarang.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan SNP di SMP Negeri 1 Mentarang

No	Faktor Pendukung	Indikator	Kesimpulan	
			OPD	SMP N1 Mentarang
1	Komunikasi	Transmisi (penyaluran komunikasi)	Melalui media cetak dan elektronik serta peninjauan	Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh OPD
		Kejelasan (kejelasan komunikasi)	Sosialisasi	Pendampingan/Supervisi
		Konsistensi (kejelasan instruksi)	Isntruksi oleh OPD	Oleh kepala sekolah mengeluarkan SK Pembagian Tugas TPK
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia/pegawai	Kompeten dalam bidangnya	Kualifikasi memadai dan kualitas cukup
		Anggaran	Didukung oleh anggaran	Didukung oleh anggaran
		Informasi	Kemampuan menjelaskan kebijakan SNP melalui pendampingan	Kemampuan melaksanakan kebijakan SNP
		Fasilitas	Tersedianya fasilitas pendukung	Tersedianya fasilitas pendukung
3	Disposisi	Pengangkatan Birokrat	Menetapkan staf untuk tugas pemantauan dan pendampingan	Melaksanakan tugas dan Fungsi TPK
		Insentif	Operasional	Belum
4	Struktur Organisasi	SOP	Belum	Tatib TPK
		Fragmentasi (tugas dan fungsi)	Sesuai kewenangan	Sesuai tupoksi TPK

Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di SMP Negeri 1 Mentarang

Implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah hakikat

pembangunan nasional Indonesia, dimana pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab diantaranya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu warga negara yang unggul secara intelektual, bermoral, kompeten dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), terampil dan produktif dalam karya dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai peran sosial, serta berdaya saing terhadap bangsa lain di era global.

Kebijakan SNP menempatkan tenaga pendidik dan kependidikan (TPK) sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan atau sekolah dan mengembangkan partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan, serta membangun kerja sama dalam upaya mencapai hasil pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan SNP di SMP Negeri 1 Mentarang merupakan model implementasi kebijakan yang bersifat top down dan model ini menuntut partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan baik dari Dinas Pendidikan selaku leading sektor, pengawas sekolah, komite sekolah, dan stakeholder lainnya termasuk masyarakat dan orang tua peserta didik atau siswa. Bahkan yang lebih penting adalah partisipasi seluruh warga sekolah baik guru maupun tenaga kependidikan serta seluruh siswa selaku kelompok sasaran (target group) untuk mengimplementasikan SNP dengan mengacu pada kebijakan PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan ini sesuai dengan model implementasi kebijakan seperti yang telah dikemukakan oleh Edward III dengan direct and indirect impact on implementation.

Komunikasi menurut Polikarpus Lalamafu (Zahra & Yuliana, 2023) “merupakan sarana yang paling efektif dan cermat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh para pelaksana (implementor). Jika pesan yang disampaikan tidak jelas dan tidak dipahami dengan baik (disorientasi informasi) maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan otoritasnya semata.” Dalam tataran inilah, maka variabel/faktor komunikasi memiliki peranan penting agar para implementor kebijakan mengetahui dan memahami secara jelas apa yang hendak dilakukan atau dikerjakan. Oleh sebab itu, komunikasi menyangkut bagaimana sebuah kebijakan disalurkan kepada publik atau kelompok sasaran (target group), penyaluran informasi memerlukan ketersediaan sumber daya agar tersampaikan secara efektif dan jelas serta terang-benderang tanpa menimbulkan suatu makna multitafsir, kemudian sikap dan tanggapan positif publik (target group) menjadi sangat penting. Maka untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan atau program harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang akan diterapkan pada lingkungan kelompok sasaran (target group).

Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (Septiana et al., 2023), bahwa Dengan struktur semacam ini sangat mempengaruhi kinerja kebijakan sehingga diperlukan improving management in government: the next step strategi manajemen sistem yang efektif. Karenanya, perbaikan sistem manajemen sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara konsisten dengan mengedepankan pelayanan publik yang optimal.

Ripley dan Franklin (Septiana et al., 2023), menegaskan terkait karakter birokratis, bahwa:

- a. Institusi birokrasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah public
- b. Birokrasi merupakan institusi dominan dalam melaksanakan program kebijakan dengan frakmentasi kepentingan yang berbeda-beda pada setiap jenjang
- c. Tujuan dan Fungsi birokrasi sangat luas dan kompleks
- d. Birokrasi mempunyai naluri yang kuat untuk mempertahankan sistem dan pola kerjanya

- e. Birokrasi merupakan satuan kerja yang tidak netral dan tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan-kekuatan yang berasal dari luar.
- f. Otonomi yang dimiliki selalu dijadikan sebagai alat tawar-menara (bergaining pocision) untuk mendapatkan keuntungan personal.

Dari pandangan di atas, struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat penting dan fundamental dalam menyelenggarakan seluruh program kebijakan publik. Oleh sebab itu, Edward III (Sutmasa, 2021) berpandangan, bahwa:

Untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah melalui SOP (standard operating procedure) dan fragmentasi. Salah satu cara melakukan fragmentasi adalah dengan menyebarkan tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja (Jamin, 2018).

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan SNP pada satuan pendidikan. Jika struktur birokrasi tidak dilaksanakan secara konsisten, maka akan berdampak pada terbenturnya tupoksi dan unsur kepentingan akan menimbulkan kurang atau tidak harmonisnya hubungan kerja, baik antar tim kerja maupun personal. Sebaliknya, penerapan struktur birokrasi yang tepat akan menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang harmonis, efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP Negeri 1 Mentarang, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini secara umum telah berjalan dengan baik, yang ditandai dengan keterlibatan lembaga pada tingkat OPD/Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP serta Pengawas Sekolah sebagai leading sector dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi komunikasi, transmisi informasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pemantauan oleh OPD/Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan, meskipun masih terdapat kendala dalam konsistensi evaluasi dan pembinaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan (TPK). Dalam aspek sumber daya, staf OPD memiliki kualifikasi yang memadai, namun di tingkat SMP Negeri 1 Mentarang masih diperlukan penambahan tenaga pendidikan dan kependidikan secara kuantitatif, sementara secara kualitatif cukup memadai meskipun masih terdapat hambatan dalam pemahaman dan keterampilan mengimplementasikan kebijakan SNP. Anggaran operasional telah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan, tetapi dana BOS di SMP Negeri 1 Mentarang hanya dapat digunakan untuk kegiatan rutin dan pemeliharaan aset sekolah, sehingga belum dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang lebih permanen. Ketersediaan fasilitas di tingkat OPD cukup memadai, tetapi di SMP Negeri 1 Mentarang masih terdapat kendala berupa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan serta kebutuhan yang semakin meningkat. Dari segi informasi, OPD telah menyediakan petunjuk pelaksanaan kebijakan SNP, tetapi masih terdapat tenaga pendidik yang kurang menguasai teknologi informasi, sehingga perlu adanya evaluasi dalam penerapan kebijakan secara lebih efektif. Dalam hal kewenangan, baik di tingkat OPD/Dinas Pendidikan maupun di SMP Negeri 1 Mentarang, tugas dan fungsi telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa tenaga pendidik yang belum melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal. Dari aspek disposisi, pengangkatan staf di OPD dan SMP Negeri 1 Mentarang telah dilakukan

beserta pemberian insentif sesuai peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan akibat keterbatasan jumlah insentif yang diberikan serta kesulitan beberapa tenaga pendidik dalam mengimplementasikan SNP. Struktur birokrasi telah tertata dengan baik dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan unit kerja terkait, serta dalam penerapan SOP yang mengatur aktivitas TPK di SMP Negeri 1 Mentarang, tetapi masih terjadi perbenturan tugas akibat kesalahan tafsir dalam deskripsi tupoksi, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan komunikasi dan menghambat implementasi kebijakan SNP secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 81–92.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Jamin, H. (2018). Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19–36.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Zahra, R. N., & Yuliana, N. (2023). Peran Komunikasi yang Efektif sebagai Kunci menuju Kesuksesan Seorang Putri Juniawan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).